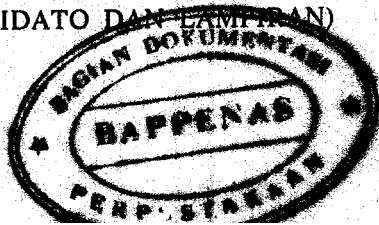


PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1977

(PIDATO DAN LAMPIRAN)



DEPARTEMEN PENERANGAN R. I.



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
yang saya hormati;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa yang telah memberi nikmat kepada kita semua dengan Kemerdekaan Nasional. Dan kita telah dikaruniai-Nya dengan Kemerdekaan Nasional itu setelah Bangsa Indonesia berjuang selama berabad-abad, suatu perjuangan besar dengan segala macam pengorbanan yang dapat diberikan oleh manusia, suatu perjuangan panjang yang tidak ada henti-hentinya dari generasi ke generasi.

Kita lebih-lebih merasa bersyukur karena Kemerdekaan itu bukan hanya dapat kita tegakkan; melainkan juga karena Kemerdekaan itu dapat kita perkokoh hingga saat ini. Malahan kita telah mulai memberi isi nyata kepada Kemerdekaan itu dengan melaksanakan pembangunan.

Tanpa kemerdekaan politik, kita tidak mungkin melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita sendiri. Memang, adalah suatu kenikmatan yang tiada taranya bahwa Bangsa kita telah memperoleh Kemerdekaan dengan perjuangan, jerih payah dan pengorbanan yang berat dan panjang.

Namun, Kemerdekaan politik tanpa pembangunan, juga tidak banyak artinya. Kita dahulu berjoang untuk merdeka bukan hanya agar kita bebas dari penjajahan asing.

Kita berjoang untuk merdeka karena kita ingin hidup terhormat sebagai manusia merdeka, sebagai bangsa merdeka; dan karena Kemerdekaan adalah syarat mutlak yang memungkinkan Bangsa Indonesia membangun dirinya.

Kita dahulu berjoang untuk merdeka, juga karena kita ingin bebas dari keterbelakangan; kemiskinan dan kebodohan. Dan kita hanya akan dapat membebaskan diri dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan itu apabila kita dapat membangun !

Karena itu memperkokoh Kemerdekaan dan mempercepat pembangunan adalah tujuan kembar dari perjuangan bangsa kita masa kini dan masa nanti !

Pembangunan itu harus mengarah kepada tercapainya tujuan jangka panjang Kemerdekaan kita; ialah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kita semua.

Apabila besok, tanggal 17 Agustus 1977, 135 juta rakyat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaannya yang ke-32, maka salah satu tujuannya adalah mensyukuri Kemerdekaan itu dan Untuk memperbaharui semangat kembali untuk melanjutkan perjuangan mengisi Kemerdekaan dengan pembangunan.

Di mana-mana di seluruh pelosok Tanah Air : di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di RT-RT, di RK-RK, di desa-desa terpencil kita bergembira dan berpesta dengan cara dan acara sendiri-sendiri.

Tetapi, bersamaan dengan gendang kegembiraan dan pesta tadi, kita tidak boleh lupa untuk membuat renungan yang dalam mengenai Kemerdekaan itu.

Kita renungkan sampai di mana tempat kita sekarang dalam sejarah bangsa ini. Kita renungkan keberhasilan-keberhasilan apa yang telah kita capai dan ketidak berhasilan apa yang terjadi selama ini. Kita renungkan apakah arah perjalanan yang kita tempuh telah membawa kita mendekati cita-cita Kemerdekaan ataukah kita salah jalan. Kita renungkan peranan apa yang telah kita berikan masing-masing pada pembangunan Bangsa yang sedang giat-giatnya kita lakukan bersama ini.

Renungan ulang seperti itu mempunyai arti yang dalam ditinjau dari berbagai sudut. Dari sudut pribadi kita masing-masing, hasil renungan yang jujur akan menambah dorongan semangat, apabila jalan pengabdian kepada rakyat dan cita-citanya telah kita tempuh secara benar. Bagi kita yang mungkin lengah atau lalai, maka hasil renungan yang jujur tadi hendaknya menyadarkan kita agar kembali kepada arah dan tujuan perjuangan semula.

Kita sesekali perlu menengok ke belakang, melihat yang baik dan yang kurang baik, mengambil pelajaran terus menerus secara pandai dari pengalaman dan sejarah kita. Kita juga harus meneliti keadaan dan tempat kita di masa kini, dibandingkan dengan keadaan di masa lampau, khususnya keadaan di tahun-tahun sebelum kita menangani masalah pembangunan ini secara sungguh-sungguh. Demikian juga, apakah kita telah menyiapkan diri. untuk menyongsong tugas-tugas dan tanggung jawab yang makin besar di masa depan.

Kitapun harus melayangkan pikiran kita mengenai masa depan, mencoba memberikan jawab atas masalah-masalah dan tantangan-tantangan kita di masa depan itu; dan membuat gambaran mengenai wajah masa depan yang kita cita-citakan bersama.

Dengan demikian maka kita melihat seluruh masalah dan tempat kita sekarang ini dalam perspektifnya sejarah !

Untuk itulah maka malam ini, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat; dan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak kita semua untuk membuat renungan secara nasional: mengenai tempat kita sekarang dalam perspektif sejarah masa lampau, masa kini dan masa datang.

Dalam kesempatan ini, seperti halnya Pidato Kenegaraan Presiden semenjak tahun 1967, maka saya juga akan melaporkan kepada Rakyat mengenai kemajuan yang kita capai dalam tahun ke-3 REPELITA II.

Saudara Ketua yang terhormat; Sidang yang Mulia;

Pidato Kenegaraan Presiden kali ini dilakukan pada waktu malam hari, karena kebiasaan konstitusional ini — untuk tahun sekarang — justru berlangsung dalam bulan Puasa. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat seluruh Tanah Air, dari mimbar ini, saya menyampaikan Selamat Berpuasa. Dan mudah-mudahan, Tuhan Yang Mahaesa memberi kekuatan lahir batin dan keteguhan iman, sehingga puasa kita berhasil dengan baik.

Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita dalam bulan Suci Ramadhan ini sungguh membawa berkah yang harus dapat kita gali hikmahnya. Dalam bulan Puasa ini kaum muslimin berusaha mensucikan diri lahir dan batin. Kita berusaha berbicara jujur dengan hati nurani kita. Kita berpuasa bukan hanya untuk menahan haus dan lapar, juga bukan hanya untuk melawan godaan dan menahan nafsu, yang dalam keadaan biasa halal apabila kita kerjakan dan hak hukumnya. Kita diwajibkan puasa supaya diri kita benar-benar menjadi orang yang bertaqwa. Taqwa berarti tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukan karena takut sehingga selalu cemas dan waswas, melainkan karena kita cinta kepada Tuhan dan karena itu kita selalu yakin pada amal perbuatan kita yang baik. Juga amal dalam membangun masyarakat.

Sikap demikian membuat hidup ini terasa membahagiakan dan indah. Sikap demikian akan menyelamatkan pembangunan kita.

Kita cinta kepada Tuhan karena Ia memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengolah dan menikmati segala kekayaan alam ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Saya katakan kita diberi "kesempatan" karena berhasil atau tidak berhasilnya kita menikmati kekayaan alam itu tergantung pada perbuatan kita sendiri, tergantung pada kemampuan dan kesungguh-sungguhan kita dalam mengolah dan memanfaatkan segala kekayaan alam, tergantung pada kesanggupan dan kesungguh-sungguhan kita dalam melaksanakan pembangunan.

Kita tunduk kepada Tuhan, karena kita sadar, bahwa di hadapan kebesarannya, maka manusia, hanyalah kecil saja artinya. Kesadaran demikian membuat kita rendah hati. Ini membuat kita mampu menahan diri dan tidak berbuat berlebih-lebihan terhadap apa yang melekat secara duniawi pada diri kita : apakah itu kedudukan, kekayaan, kepandaian atau kehormatan. Ini akan melahirkan sikap saling menghargai dan kesetiakawanan antara manusia, yang merupakan unsur penting bagi terciptanya suasana aman, tenteram dan damai yang membahagiakan.

Perasaan kecil di hadapan Tuhan tidak berarti membuat kita menyerah tanpa daya. Kecil di hadapan Tuhan justru memupuk rasa yang positif, mengembalikan segala-galanya dengan penuh kesadaran kepada Tuhan. Dalam hal kita berhasil atau menerima rezeki, kita syukuri hal itu sebagai rahmat yang dilimpahkanNya kepada kita atas jerih payah yang telah kita curahkan. Dalam hal kita tertimpa musibah atau kegagalan, kita anggap itu sebagai cobaan Tuhan; yang memberi dorongan kita untuk bersikap lebih berhati-hati dan bekerja lebih baik di masa datang. Dalam bulan Puasa ini jangankan kita berbuat atau berkata-kata jelek, berpikiran jelekpun tidak dibenarkan.

Karena itulah, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita kali ini yang bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan sungguh merupakan rahmat bagi kita semua.

Dengan pikiran jernih, tenang, jauh dari sikap buruk sangka, marilah kita membuat penilaian atas perjalanan sejarah kita sampai saat ini.

Tugas terbesar kita sekarang adalah melaksanakan dan meneruskan pembangunan!

Ini adalah pilihan sejarah yang telah kita putuskan bersama-sama sejak tahun 1966.

Seperti telah saya tegaskan tadi, tanpa melaksanakan pembangunan adalah mustahil kita mencapai cita-cita yang telah kita impikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sana ditegaskan, bahwa kita semua — segenap Bangsa Indonesia dan se-

luruh tumpah darah Indonesia ini — ingin hidup bahagia lahir batin di bawah lindungan Negara kita yang demokratis. Kita berjuang untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita berusaha sekeras-kerasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Malahan, kita juga ikut memperjuangkan terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Singkatnya, yang kita perjuangkan adalah terwujudnya masyarakat yang makmur dan berkeadilan berdasarkan Pancasila, dalam dunia yang tenteram damai dan adil.

Itulah tujuan akhir perjuangan kita! Itulah tekad bulat Orde Baru! Dan tidak seujung rambutpun kita akan bergeser dari tujuan itu.

Mewujudkan masyarakat yang demikian terang merupakan pekerjaan besar-besaran yang memerlukan keuletan dan ketabahan. Mewujudkan masyarakat yang demikian malahan merupakan perjuangan besar. Dan selama 11 tahun Orde Baru ini kita telah secara terus menerus bersatu, berjuang, untuk selangkah demi selangkah mendekati tujuan perjuangan itu.

Juga sangat terang bahwa dalam masyarakat yang kita cita-citakan itu bukanlah hanya kecukupan serba benda atau gemerlapannya kemajuan-kemajuan lahir yang kita kejar.

Tetapi juga sangat terang bagi kita, bahwa tanpa kemajuan kebendaan, maka cita-cita masyarakat yang adil dan makmur adalah mustahil. Karena itu pembangunan yang kites kerjakan bukan hanya mengejar kemajuan lahir saja. Juga bukan hanya mengejar kebahagiaan batin semata-mata. Melainkan: kedua-duanya kita kejar bersama-sama sehingga tercapai keselarasan antara kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.

Dengan kata lain pembangunan yang kita tuju harus pula menjunjung nilai-nilai yang kita anggap luhur, nilai-nilai yang memanusiaikan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai yang kita anggap luhur itu telah tercakup dengan jelas, padat dan bulat dalam Pancasila.

Karena itu pula, pembangunan yang kita kerjakan bukan hanya semata-mata mengejar tercapainya tujuan. Melainkan, bersamaan dengan itu, adalah sama pentingnya, cara-cara bagaimana tujuan itu kita capai.

Sungguh bersyukurlah Bangsa Indonesia yang sejak lahirnya kemerdekaan negaranya telah memiliki cita-cita dan tujuan perjuangan yang luhur serta ketentuan tata cara yang dianggapnya baik dan cocok untuk mencapai tujuan itu, yaitu yang telah secara khidmad dan padat dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, bagi kita, berhasil atau tidak berhasilnya pembangunan negara dan bangsa, maju atau tidak majunya pembangunan, kokoh atau rapuhnya kekuatan pembangunan, juga akan ditentukan oleh kuat atau lemahnya pelaksanaan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

Sekarang, pada saat kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, marilah kita kaji bersama-sama sampai di mana kita telah berusaha melaksanakan dan menegakkan konstitusi kita itu yang sekaligus juga menumbuhkan kehidupan demokrasi.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Tegaknya konstitusi dan tumbuhnya demokrasi inilah yang antara lain merupakan sasaran perjuangan Orde Baru. Di dalamnya terkandung pula usaha untuk melaksanakan dan memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, yaitu mekanisme atau tata cara dasar mengenai bagaimana kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita bina dan kita atur pada puncak pengendalian kehidupan bangsa dan negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Selama 11 tahun kita menegakkan Orde Baru maka kehidupan konstitusional dan demokrasi itu telah kita usahakan bersama-sama dengan sepenuh-penuh tekad dan kemauan.

Dalam masa pergolakan politik dan masa transisi Orde Lama ke Orde Baru antara tahun 1966— 1968, Orde Baru telah berhasil mengatasi kemelut konstitusional dengan cara-cara konstitusional, melalui Sidang-sidang MPR Sementara dalam tahun 1966, 1967 dan 1968.

Setelah Orde Baru dapat mengkonsolidasi diri dengan melalui Sidang MPRS dalam tahun 1968 yang menghasilkan diangkatnya Presiden untuk waktu 5 tahun, yang memungkinkan Orde Baru mulai melaksanakan Pembangunan Lima Tahun dan melaksanakan Pemilihan Umum dalam tahun 1971 untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam MPR, maka tonggak sejarah konstitusional yang sangat penting berikutnya dalam sejarah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berlangsungnya Sidang Umum MPR bulan Maret 1973. Sidang Umum MPR tahun 1973 merupakan peristiwa konstitusional yang bersejarah, bukan saja karena untuk pertama kali dalam sejarah terselenggara Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum, tetapi juga merupakan Sidang MPR yang pertama yang berhasil melaksanakan tugas-tugas konstitusional secara lengkap.

Dalam sidang ini, Presiden/Mandataris telah memulai dengan praktek konstitusional baru, yaitu pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan mandatnya kepada MPR seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Umum MPR tahun 1973 itu juga telah menghasilkan keputusan-keputusan konstitusional seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, setelah menilai dan menerima pertanggungjawaban Presiden, menetapkan GBHN dan memilih Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk lima tahun, tahun 1973 — 1978.

Presiden terpilih ini berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang MPR pada akhir masa jabatannya yaitu pada bulan Maret 1978. Maka sesuai dengan Ketetapan MPR tahun 1973, untuk membentuk MPR yang akan bersidang dalam bulan Maret 1978 itu perlu diselenggarakan Pemilihan Umum dalam tahun 1977, yang pelaksanaannya telah dilakukan pada bulan Mei yang lalu. MPR hasil Pemilihan Umum 1977 itulah yang bersidang dan menilai pertanggungjawaban Presiden, bukan MPR hasil Pemilihan Umum 1971, karena MPR hasil Pemilihan Umum 1977 itulah yang akan Menentukan GBHN, mengangkat Presiden/Mandataris dan mengangkat Wakil Presiden untuk waktu selanjutnya, tahun 1978 - 1983.

Rangkaian tonggak-tonggak pelaksanaan demokrasi dan konstitusi mulai dari Pemilihan Umum, pembentukan MPR hasil Pemilihan

Umum, Sidang Umum MPR yang akan mengadakan penilaian pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan GBHN, penetapan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun berikutnya, itu semua merupakan putaran atau siklus mekanisme kepemimpinan nasional yang harus kita tegakkan bersama-sama. Apabila dalam bulan Maret 1978 nanti MPR hasil Pemilihan Umum 1977 telah berhasil melaksanakan tugas-tugas tersebut seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk pertama kalinya bulatlah sudah putaran atau siklus mekanisme kepemimpinan nasional dan mulailah siklus mekanisme kepemimpinan nasional periode 5 tahun berikutnya dan seterusnya.

Kita sungguh merasa bangga bahwa putaran yang lengkap dari kepemimpinan nasional yang kita laksanakan secara demokratis dan konstitusional itu justru untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini dapat terlaksana dalam masa Orde Baru ini!

Putaran yang demikian itulah yang akan terus menerus kita lakukan dan makin kita mantapkan sekali dalam lima tahun di masa-masa yang akan datang.

Apabila dalam bulan Maret tahun depan, Insya Allah, kita dapat menyelesaikan secara bulat putaran kepemimpinan nasional secara demikian, maka hal itu merupakan salah satu hasil terbesar dari Orde Baru dalam menegakkan kehidupan konstitusional dan demokrasi.

Dan menegakkan kehidupan konstitusional dan menumbuhkan demokrasi tadi merupakan hasil besar dalam, pembangunan di lapangan politik.

Di samping semuanya itu juga harus kita catat bahwa peserta Pemilihan Umum 1977 yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya — adalah wadah-wadah kekuatan sosial politik rakyat yang diatur dan dilindungi oleh Undang-undang. Inipun merupakan hasil besar dalam pembinaan dan pertumbuhan demokrasi di negara kita, sebab dalam sejarah kita di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 baru pertama kali itulah kehidupan kekuatan-kekuatan sosial politik didasarkan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Karena itulah, untuk kesekian kalinya saya ingin menegaskan, bahwa Pemilihan Umum 1977 merupakan prestasi besar dalam kita menegakkan kehidupan konstitusional dan menumbuhkan demokrasi.

Kita tidak habis-habisnya bersyukur karena Pemilu yang baru lalu itu telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Asas langsung, umum, bebas dan rahasia telah dapat kita terapkan. Memang, dalam Pemilu yang baru lalu itu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan permainan yang dilakukan oleh perorangan dari semua fihak. Kita selesaikan hal itu secara adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang lalu itu, marilah kita pelajari kekurangan itu dan kita gunakan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu yang akan datang.

Dalam rangka melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional itu, maka Pemilihan Umum diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam DPR dan MPR.

Pemilihan Umum tahun 1977 sekarang telah lewat. Hasil-hasil Pemilu itu telah diumumkan. DPRD-DPRD hasil Pemilu 1977 telah diresmikan. Dewasa ini sedang disiapkan peresmian DPR dan MPR hasil Pemilu. 1977 yang akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1977. Kita menyongsong dengan, penuh harapan hasil kerja dan pelaksanaan tugas dari Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itu, khususnya yang terpenting adalah Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 nanti.

Marilah kita mengembalikan ketenangan lahir dan batin kita, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam. Kita memang berbeda-beda, tetapi kita tetap kuat rasa persatuan kita. Dan dengan semangat persatuan yang demikian itu kita menyongsong tugas-tugas nasional di masa datang yang dekat, Sidang Umum MPR yang akan datang, maupun masa depan yang jauh, termasuk pelaksanaan Pemilu tahun 1982 yang harus lebih baik dari yang sekarang.

Saudara Ketua, Sidang Dewan yang terhormat;

Selain usaha menegakkan dan melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional, sesungguhnya Orde Baru telah berusaha untuk

mengetrapkan dalam praktek ketentuan konstitusi, khususnya dalam hubungan tugas antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak kelahiran Orde Baru, maka setiap tahun Pemerintah selalu mengajukan Rancangan Anggaran Belanja kepada DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang sangat penting yang harus kita tegakkan bersama.

Demikian pula dalam hal pembuatan Undang-undang Pemerintah Orde Baru selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dan ketentuan-ketentuan perundangan lainnya.

Menegakkan kehidupan Orde Baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah identik dengan menegakkan kehidupan yang demokratis.

Dalam hal ini saya perlu mengingatkan bahwa wawasan kita mengenai demokrasi haruslah berpangkal dari kepribadian dan kebutuhan bangsa kita sendiri. Sama halnya dengan pembangunan, maka tidak ada satu model demokrasipun yang dapat diterapkan begitu saja untuk semua bangsa. Kita hendaknya mengambil pelajaran secara pandai dari pengalaman-pengalaman kita sendiri dan pengalaman negara-negara sedang membangun lainnya dalam mencari bentuk demokrasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Bagi kita, wawasan mengenai demokrasi yang cocok untuk kita sendiri sebenarnya telah cukup jelas. Yang kita bangun adalah demokrasi Pancasila, ialah yang menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat. Pokok-pokok pikiran yang dengan khidmat tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita menegaskan, bahwa Negara ini mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Dalam demokrasi Pancasila sama sekali tidak berarti bahwa perbedaan pendapat harus dilenyapkan. Selain melawan kodrat, maka matinya perbedaan pendapat berarti macetnya pikiran-pikiran segar untuk perbaikan. Persoalannya adalah bahwa perbedaan pendapat itu

tidak harus diruncing-runcingkan, lebih-lebih untuk menekan atau mengancam pihak lain.

Sebagai bangsa yang besar, yang mengandung berbagai kemajemukan dan kebhinnekaan, kita tidak boleh tergelincir pada peruncingan perbedaan di antara kita. Bila hal ini terjadi maka cepat atau lambat ia akan mengganggu dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita adalah lumrah dan wajar. Akan tetapi kita harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan atau diperlawankan melainkan untuk diperdekatkan dan dipertemukan secara musyawarah dan mufakat.

Musyawarah dan mufakat berarti bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hendaklah dibicarakan dan dipecahkan dengan semangat kekeluargaan sehingga tercapai kesepakatan yang memuaskan kita bersama. Tiada mutlak-mutlakan; dan tiada yang merasa menang atau kalah. Dalam musyawarah dan mufakat yang menang adalah akal sehat dan kepentingan bersama.

Untuk itu yang diperlukan oleh para pemuka bangsa dan masyarakat kita adalah kearifan untuk membaca semangat zaman, untuk memahami apa yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan umum!

Walaupun kita menempatkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana demokrasi yang penting, namun kita juga harus mengembangkan jalur-jalur demokrasi yang lain. Dalam hal ini sangat penting tumbuhnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini maka pers Indonesia menikmati kebebasan yang cukup longgar. Setidak-tidaknya bukan tergolong buruk di kawasan Asia dan dalam deretan negara-negara yang sedang membangun lainnya. Tidak jemu-jemunya saya menekankan agar kebebasan yang dimiliki oleh pers itu benar-benar digunakan secara bertanggung jawab. Warga pers agar terus mengadakan introspeksi atas kelemahan-kelemahannya dan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya.

Kebebasan mengeluarkan pendapat juga kita hormati bersama. Apabila akhir-akhir ini terdengar suara-suara lantang yang tertuju

kepada Pemerintah, maka hal itu juga merupakan bukti bahwa demokrasi di negeri ini tidak mati. Kepada mereka yang mendengungkan suara bahwa di negeri ini tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan demokrasi, saya ingin mengingatkan, bahwa suara itu dapat mereka dengungkan justru karena kebebasan dan demokrasi tetap tumbuh di sini. Namun apabila suara-suara ini hanya merupakan tabir asap untuk tujuan-tujuan lain yang merusak maka adalah tugas Pemerintah untuk meneliti dan menertibkannya.

Bagi kita, demokrasi sekedar untuk demokrasi adalah hanya memenuhi kepuasan mewah yang kelak mungkin harus kita bayar terlalu mahal.

Demokrasi kita menempatkan kebebasan sama pentingnya dengan tanggung jawab ! Sebab, kebebasan tanpa tanggung jawab sama saja dengan mengundang kekacauan.

Karena itu adalah kepentingan kita semua apabila lembaga-lembaga perwakilan rakyat dapat berfungsi sebaik-baiknya sebagai saluran terpenting pelaksana demokrasi justru karena lembaga-lembaga perwakilan rakyat inilah yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Jalan yang kita tempuh bersama untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat itu memang panjang ; kadang-kadang malahan berat. Hal itu dirasakan bersama oleh Dewan yang terhormat dan Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai rancangan Undang-undang, justru karena kita bertekad menegakkan demokrasi kita sendiri, justru karena kita ingin bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bulat, maka tidak jarang penyelesaian suatu rancangan Undang-undang berjalan lama, lambat dan berat. Penyelesaian Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pemerintahan Daerah dan lain-lain merupakan bukti-bukti betapa berat dan tabah kita dalam menegakkan demokrasi. Dengan sadar kita juga berusaha keras untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dengan pemungutan suara, — yang hal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945 —, justru karena kita ingin tetap menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Juga penting kita catat,

bahwa dalam Dewan yang terhormat ini tidak jarang kebijaksanaan Pemerintah diserang dengan sengit oleh semua fraksi.

Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, bahwa sesungguhnya demokrasi sedang tumbuh di negeri ini untuk mencapai kedewasaan dan kematangannya.

Namun kita tetap radar, bahwa — seperti saya katakan tadi — demokrasi bukanlah hanya untuk demokrasi. Demokrasi harus juga berarti tanggung jawab bersama dalam mengambil keputusan mengenai pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.

Dan pembangunan itu adalah tugas pokok kita. Tanpa pembangunan kita tidak akan pernah dapat mencapai masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Kita merasa sangat berbahagia karena strategi, arah dan tujuan pembangunan itu telah diletakkan garis-garis besarnya oleh MPR, lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Kita juga merasa gembira karena rencana tahunan dari pelaksanaan pembangunan itu selalu dimintakan kata sepakat dari Dewan yang terhormat melalui Undang-undang APBN.

Karena itu, Saudara Ketua, dari mimbar ini saya ingin melaporkan pelaksanaan pembangunan sampai saat ini kepada Dewan yang terhormat dan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Seperti yang telah saya kemukakan kepada Dewan yang terhormat tatkala saya mengantarkan Rancangan APBN 1977/'78 pada awal tahun maka arah pembangunan kita bertumpu pada Trilogi Pembangunan ; yang meliputi stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan menuju keadilan sosial. Marilah sekarang kita teliti bersama apakah pembangunan yang kita kerjakan selama ini telah mengarah ke sana, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial.

Saya tidak akan berpanjang lebar membentangkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita capai dalam tahun ketiga REPELITA II. Semuanya itu dengan luas dan mendalam dapat diteliti oleh para Anggota Dewan yang terhormat dalam Lampiran Pidato Kenegaraan saya ini.

Saya rasa cukup bila saya menunjukkan tonggak-tonggak tanda dalam perjalanan maju kita sampai saat ini.

Mengenai stabilitas ekonomi dapat kita lihat bahwa kemantapannya dapat kita pertahankan. Di tengah-tengah makin cepatnya putaran roda-roda pembangunan yang memerlukan biaya besar itu, maka laju inflasi dapat tetap berada dalam pengendalian kita, sehingga tidak membahayakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan. Demikian juga penyediaan dan peredaran barang-barang kebutuhan sehari-hari dan 9 bahan pokok sepanjang tahun, khususnya menjelang Hari-hari Raya ataupun paceklik tetap lancar dan dengan harga yang relatif stabil.

Dalam menilai pertumbuhan ekonomi, saya juga akan menunjuk pada beberapa sektor produksi yang membesarkan hati.

Langkah-langkah besar, misalnya, telah kita langkahkan di lapangan industri. Beberapa jenis produksi telah mencapai tingkat swasembada, malahan telah mulai diekspor, misalnya pupuk dan semen.

Apabila waktu memulai REPELITA I sampai pada tahun-tahun pertama REPELITA II dahulu tidak sedikit devisa yang kita bayarkan untuk impor-pupuk urea misalnya, maka kini kita malahan mampu mengekspor pupuk tersebut. Kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, di samping itu kita juga memiliki cadangan tidak kurang dari 500.000 ton. Tahun ini kita dapat mengekspor urea ke berbagai negara ASEAN dan negara-negara lainnya. Sejak beberapa bulan terakhir sampai dengan akhir tahun ini ekspor urea kita akan mencapai sekitar 300.000 ton. Dalam waktu dekat jumlah itu akan meningkat sampai sekitar 400.000 ton. Ini merupakan bukti betapa pesatnya kemajuan industri petro kimia, yang mampu menunjang pembangunan pertanian dan makin menyehatkan neraca pembayaran Indonesia.

Kemajuan yang lama juga dialami oleh industri semen. Apabila pada beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami kesulitan bahan pembangunan yang penting ini, maka sekarang untuk pulau Jawa kita sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kita sekarang hanya mengimpor semen untuk memenuhi daerah-daerah yang jauh, yang

sukar dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Produksi semen ini akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang, dengan berproduksinya beberapa pabrik semen yang sekarang ini sedang dalam penyelesaian.

Dalam kita bersiap-siap memasuki REPELITA ketiga, maka kita juga telah mulai meletakkan landasan bagi industri dasar. Dalam hubungan ini, menjelang akhir bulan Juli yang lalu Pabrik Baja PT. Krakatau Steel di Cilegon telah mulai menghasilkan beberapa jenis produksi Baja, yang akan dilanjutkan pembangunannya sehingga akan benar-benar merupakan industri yang mendorong gerak cepat pembangunan.

Dalam pada itu aneka industri juga memperoleh kemajuan-kemajuan yang berarti dengan mulai mengeksport hasil produksinya seperti industri makanan, industri pengolahan kayu, industri kulit dan barang kerajinan lainnya.

Mengenai tekstil, apabila dahulu pada saat-saat menghadapi Hari-hari Raya selalu direpotkan dengan persiapan impor dan penyediaan bahan sandang, maka sekarang industri tekstil dalam negeri telah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sepenuhnya. Kini dunia industri tekstil kita telah melangkah ke luar, dengan mengeksport pakaian jadi. Sementara itu ekspor tradisional seperti ekspor sarong dan kain batik terus bertambah besar.

Kemajuan-kemajuan yang berarti juga kita capai di bidang pertambangan dalam tahun ke-3 REPELITA II sekarang ini.

Sesuai dengan arah pembangunan yang ditegaskan dalam GBHN, maka sektor pertambangan juga telah meningkatkan usahanya untuk mengolah bahan tambang menjadi bahan baku atau bahan jadi. Untuk itu antara lain kita telah mengolah di dalam negeri seluruh bijih timah menjadi logam timah.

Bijih nikel berkadar rendah — yang tidak laku diekspor — juga telah kita olah menjadi feronikel dan nikel matte. Sedangkan proses pembangunan pengecoran aluminium di Asahan dewasa ini telah dalam taraf pelaksanaan.

Pada awal bulan ini Kilang Gas Alam Cair di Bontang Selatan, Kalimantan Timur, telah mulai berproduksi dan pengapalan ekspor pertama telah berlangsung. Kilang yang serupa juga sedang dalam pembangunan di Arun, Aceh. Produksi Gas Alam Cair membawa dunia industri kita memasuki tahap baru, justru karena penggunaan teknologi mutakhir dalam produksinya. Selain itu produksi Gas Alam Cair juga membawa kita pada langkah nyata untuk mulai sekarang memikirkan sumber daya energi yang harus makin beraneka ragam.

Di bidang minyak bumi kemajuan-kemajuan tercatat dalam berbagai hal. Sumur-sumur baru ditemukan, beberapa di antaranya telah mulai berproduksi. Kilang minyak baru yang cukup besar telah selesai dibangun di Cilacap. Ini berarti bertambah besarnya kemampuan pengadaan minyak dan minyak pelumas untuk kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Melihat terus meningkatnya produksi di berbagai industri, pertambangan dan juga pertanian, yang sebagian juga merupakan produksi atau komoditi untuk ekspor, maka tampak jelas bahwa penerimaan devisa kita dari ekspor terus meningkat sehingga keadaan cadangan devisa kita menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan keadaan satu atau dua tahun yang lalu. Bahkan, penerimaan devisa dalam tahun keempat REPELITA II akan naik hampir 10 kali lipat jika dibanding dengan penerimaan devisa dalam tahun pertama REPELITA I. Dalam tahun 1969 penerimaan devisa kita di sekitar 1 milyar data Amerika; pada tahun 1976/'77 yang lalu telah mencapai sekitar 9 milyar dolar Amerika dan tahun 1977/'78 nanti diperkirakan akan mencapai 10 milyar dolar Amerika atau lebih.

Di samping itu kemajuan ekonomi nasional kita juga dapat dilihat dari Makin besarnya negara dapat menyediakan anggaran belanja, khususnya anggaran pembangunan. Apabila pada tahun pertama REPELITA I dahulu APBN kita hanya berkisar pada jumlah Rp. 325 milyar, maka kini 9 tahun kemudian — angka itu naik hampir 14 kali menjadi Rp. 4,2 trilyun. Sedangkan anggaran pembangunan yang pada permulaan REPELITA I baru dapat disediakan sekitar Rp. 125 milyar, maka kini kita dapat menyediakan jumlah Rp. 2,11 trilyun untuk biaya proyek-proyek pembangunan. Adalah benar bahwa selama

periode tersebut telah terjadi kenaikan harga. Namun jelas pula bahwa selama masa tersebut kenaikan APBN dan anggaran pembangunan adalah jauh lebih besar daripada kenaikan harga.

Dari berbagai fakta dan data yang saya kemukakan tadi tampaknya bahwa ekonomi kita dapat terus berkembang lebih baik, meskipun krisis ekonomi dunia yang berkecamuk beberapa tahun yang lalu dewasa ini belum lenyap akibat-akibat dan pengaruhnya.

Namun, seperti yang saya singgung tadi, persoalan pokok bagi kita yang sedang membangun ini adalah: apakah kemajuan-kemajuan ekonomi dan pembangunan tadi benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Marilah kita kaji persoalan ini.

Dari sudut anggaran pembangunan maka tampak jelas bahwa bagian terbesar anggaran pembangunan itu dicurahkan pada kepentingan rakyat banyak dan tersebar meliputi semua daerah sampai ke desa-desa; seperti pembangunan pertanian, pembangunan bendungan dan irigasi, pembangunan daerah dan pembangunan desa, pembangunan gedung-gedung SD, pembangunan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat dan sebagainya.

Demikian juga telah banyak langkah-langkah kebijaksanaan yang sasarannya adalah untuk memajukan rakyat banyak dan untuk kepentingan rakyat kecil, seperti pemberian kredit bimas, kredit pengadaan pangan, kredit investasi kecil, kredit candak kulak, KMKP, pembinaan tataniaga cengkeh, kopra dan lain-lain.

Dan hasilnya sungguh membesarkan hati !

Sebagai hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka pendapatan rata-rata penduduk juga meningkat. Apabila sebelum pelaksanaan REPELITA I pendapatan rata-rata penduduk di sekitar 80 dolar Amerika, maka setelah kita melaksanakan REPELITA I dan REPELITA II sampai sekarang, pendapatan perkapita sudah 180 dolar Amerika, berarti telah naik 1255 dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Ditinjau daripada perataan dan pembagian pendapatan penduduk, maka menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang kompeten, maka kenaikan pendapatan rata-rata penduduk golongan miskin di daerah pedesaan bertambah lebih cepat dibanding dengan kenaikan pendapatan penduduk golongan kaya. Ini menunjukkan bahwa justru di desa-desa jurang pemisah antara si kaya dan si miskin mulai dapat diperkecil. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas petani-petani kecil dan bertambahnya kesempatan kerja pada berbagai-bagai proyek pembangunan di desa-desa. Makin merata pembagian pendapatan berarti ada gerak maju ke arah keadilan sosial.

Sebaliknya, memang, di daerah kota kenaikan pendapatan penduduk golongan kaya telah lebih cepat, dibanding dengan kenaikan pendapatan penduduk golongan miskin. Gejala memang tidak sehat. Sesungguhnya hal itu merupakan gejala umum pada tahap-tahap awal pembangunan di negara-negara yang sedang membangun. Meskipun demikian kita harus terus menerus memperbaiki keadaan yang tidak sehat di daerah kota tersebut.

Akan tetapi, justru karena bagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, dan karena arah menuju keadilan sosial makin lebih jelas di desa-desa, maka secara umum — dengan penuh kelegaan ! — kita dapat meyakinkan pada diri sendiri bahwa arah tujuan pembangunan kita telah benar !

Masih ada tanda-tanda penting yang lain yang menunjukkan bahwa memang ada peningkatan tingkat hidup di kalangan rakyat. Ialah : bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan telah Makin turun dari tahun ke tahun !

Bank Dunia membuat dua ukuran mengenai batas Garis Kemiskinan ini. Untuk daerah kota, sebagai patokan digunakan angka 75 dolar Amerika atau sekitar Rp. 30.000,— tiap orang tiap tahun. Sedang untuk daerah pedesaan digunakan angka 50 dolar Amerika atau sedikit di atas Rp. 20.000,— tiap orang tiap tahun. Mereka yang hidup di bawah angka-angka tadi tergolong penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Angka-angka yang akan saya sebutkan sebentar lagi jelas menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat telah dapat kita angkat dari lumpur Garis Kemiskinan tadi !

Berdasarkan hasil penelitian maka pada tahun 1967 ada 9 di antara 10 orang rakyat Indonesia hidup di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 1970 lebih banyak lagi rakyat yang kita bebaskan dari bawah Garis Kemiskinan, hanya 8 dari 10 orang yang hidup di bawah Garis Kemiskinan.

Dan sekarang, dalam tahun 1976 yang lalu, maka angka itu makin baik lagi. Hanya 3 di antara 10 orang yang masih menderita di bawah Garis Kemiskinan !

Saya yakin, apabila pertumbuhan ekonomi dapat kita pupuk terus, dan apabila langkah-langkah ke arah pemerataan pembangunan dapat makin kita tebarkan ke mana-mana, maka — Insya Allah — pada akhir REPELITA III nanti tidak ada lagi orang yang menderita di bawah Garis Kemiskinan !

Usaha untuk makin meratakan pembagian hasil pembangunan terus kita lakukan. Segala jalan yang masuk akal untuk meratakan pembangunan dan langkah ke arah keadilan sosial terus kita tempuh dengan keyakinan yang teguh. Enam hari yang lalu, misalnya, saya telah meresmikan kegiatan Pasar Modal. Langkah ini juga merupakan langkah menuju ke arah pemerataan pembangunan. Perusahaan yang sehat diberi kesempatan untuk menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat. Karena tujuannya adalah untuk pemerataan, dan agar sebanyak mungkin orang dapat ikut memiliki saham, maka saham-saham itu dipecah-pecah lagi dalam pecahan saham yang lebih kecil yang sesuai dengan jangkauan kemampuan bagian besar lapisan masyarakat.

Dengan kesempatan membeli saham, maka masyarakat luas pun mempunyai kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan-perusahaan dengan cara-cara yang baik dan tidak merusak. Dengan ini, maka asas kekeluargaan seperti yang diisyaratkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar telah kita coba mewujudkannya dari salah satu segi.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Hal lain, yang kadang-kadang masih dipersoalkan adalah mengenai pinjaman luar negeri yang kita terima untuk pembiayaan pembangunan berbagai proyek. Demikian pula mengenai penanaman modal asing. Ada sebagian dan kita masih juga bertanya : apakah pinjaman luar negeri itu tidak merupakan beban berat bagi negara; dan apakah bukan generasi yang akan datang yang harus memikul warisan hutang yang dibuat oleh kita yang hidup di masa sekarang.

Walaupun telah sering saya jelaskan, namun ada baiknya saya jelaskan sekali lagi dalam kesempatan ini.

Dengan tegas saya dapat menyatakan, bahwa pinjaman luar negeri tidak akan memberatkan beban kita sekarang dan juga tidak akan memberatkan generasi yang akan datang !

Sebab : pinjaman-pinjaman tadi hanya kita terima apabila sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan kita. Di samping itu kita hanya mau menerima pinjaman apabila syarat-syaratnya dapat kita setujui. Kita juga memperhitungkan baik-baik kemampuan kita untuk membayar kembali pinjaman itu. Malahan hasil yang akan kita peroleh dari pinjaman tadi, dalam jangka panjang, harus lebih besar nilainya dari jumlah pinjaman yang kita peroleh sekarang. Sebagai contoh misalnya mengenai proyek Gas Alam Cair yang baru-baru ini telah mulai mengekspor hasilnya di Bontang, Kalimantan Timur; yang kemudian akan disusul dengan proyek serupa di Arun, Aceh. Kedua proyek ini kita biayai dengan pinjaman sebesar lebih dari 1,6 milyar dolar Amerika. Kita harus mengembalikan pinjaman itu dalam tempo 12 tahun. Jumlah yang harus kita kembalikan, termasuk bunganya, akan mencapai sekitar 2,2 milyar dolar Amerika. Namun dalam tempo 20 tahun penghasilan kedua proyek tadi akan mencapai hampir 19 milyar dolar Amerika, Ini berarti bahwa jumlah nilai yang dihasilkan proyek tersebut jauh lebih besar daripada beban pinjaman. Selama 12 tahun, kita akan memperoleh kelebihan penerimaan devisa setelah dikurangi dengan cicilan hutang, yang berarti kita telah memperoleh hasil; dan pada tahun-tahun selanjutnya kita akan menerima, hasil bersihnya dan akan dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dasar perhitungan seperti itu pula yang kita gunakan dalam membangun pabrik-pabrik pupuk, proyek raksasa Asahan di Sumatera, satelit Palapa serta jaringan telekomunikasi yang meliputi seluruh wilayah Tanah Air dan banyak proyek-proyek lainnya lagi. Singkatnya setiap pinjaman luar negeri selalu kita gunakan untuk membangun proyek-proyek yang dapat membayar sendiri pinjaman itu dari hasilnya sendiri; dan seterusnya generasi yang akan datang tinggal menikmati hasil bersihnya saja.

Demikian pula mengenai pinjaman luar negeri yang kita masukkan dalam APBN guna pembiayaan proyek-proyek pembangunan seperti bendungan dan irigasi, listrik, jalan dan jembatan, air minum dan prasarana lainnya. Memang, dari tahun ke tahun jumlah pinjaman luar negeri itu makin besar. Namun sebaliknya jumlah dana yang kita kerahkan dari kekuatan dalam negeri sendiri meningkat lebih besar. Karena itu dari tahun ke tahun, maka bagian dari pinjaman luar negeri itu menjadi lebih kecil. Dan akhirnya nanti segala beban pembangunan akan sepenuhnya kita pikul sendiri. Ini menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri itu kita gunakan sebaik-baiknya justru untuk memperbesar kemampuan menghimpun dana dari kekuatan kita sendiri.

Dengan berpegang pada dasar pikiran yang demikian itu pulalah kita berusaha untuk menyelesaikan beban pinjaman yang diderita oleh Pertamina. Sebagian dari pinjaman yang dilakukan oleh Pertamina Memang ada yang digunakan untuk proyek-proyek yang produktif seperti proyek LNG, kilang minyak, eksplorasi dan eksploitasi minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tetapi sebagian lagi tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah dan bahkan ada yang tidak diketahui oleh Pemerintah, sedangkan persyaratan-persyaratan atas pinjaman atau perjanjian yang menimbulkan beban pinjaman itu kebanyakan sangat, tidak menguntungkan Pertamina, persyaratan-persyaratan yang tampaknya tidak lazim ada pada perjanjian-perjanjian yang wajar. Jumlah beban/pinjaman yang demikian ini meliputi bermilyar-milyar dolar.

Oleh karena itu, Pemerintah begitu mengetahui parahnya keadaan Pertamina, telah mengambil langkah-langkah untuk menyela-

matkan keuangan negara, menyelamatkan Pertamina dari kebangkrutan dan menertibkan secara keseluruhan manajemen dan administrasi Pertamina. Dan usaha-usaha itu sampai sekarang telah mencapai hasil-hasil yang menggembirakan. Beban pinjaman Pertamina — yang penyelesaiannya dibantu oleh Pemerintah — dapat diperkecil sekecil mungkin, Pertamina dapat meneruskan fungsinya dengan baik.

Demikianlah antara lain masalah kontrak sewa beli tanker samudra yang kita nilai bukan saja tidak sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, tetapi kontrak-kontrak tersebut yang sangat merugikan Pertamina tampaknya tidak dilandasi oleh persyaratan yang lazimnya diperlukan oleh perjanjian yang sehat. Apabila kontrak-kontrak itu diteruskan akan makin memberatkan Pertamina. Oleh karena itu bagi Pemerintah dalam rangka mengamankan keuangan negara dan keuangan Pertamina serta penertiban secara keseluruhan — tidak ada jalan lain kecuali untuk mencari jalan ke arah pembatalan kontrak-kontrak tersebut baik melalui perundingan dengan pihak-pihak yang bersangkutan ataupun apabila perlu melalui Pengadilan.

Syukur alhamdulillah usaha-usaha itu sekarang ini sebagian besar telah dapat diselesaikan. - Sampai sekarang dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah itu beban kewajiban Pertamina dari kontrak sewa beli tanker yang semula akan mencapai jumlah sekitar 3,3 milyar dolar Amerika dapat ditekan sampai sekecil mungkin. Yang sudah berhasil dicapai penyelesaian sebanyak 27 kapal tanker yang nilai sewa belinya semula berjumlah sekitar 2,8 milyar dolar Amerika.

Setelah tercapai persetujuan pembatalan kontrak, kewajiban Pertamina tinggal menjadi 255 juta dolar Amerika. Untuk kontrak sewa beli lainnya yang meliputi jumlah 9 tanker sekitar 470 juta dolar Amerika dewasa ini sedang diadakan usaha-usaha penyelesaian dengan cara-cara yang sama dan diharapkan juga akan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama, sehingga kewajiban Pertamina dapat diperkecil lagi. Sementara itu penertiban atas tubuh Pertamina akan terus dilaksanakan termasuk tindakan hukum terhadap yang bersalah dalam peristiwa krisis Pertamina ini.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dasar pikiran dan tujuan dari pinjaman luar negeri itu juga kita terapkan dalam mengundang penanaman modal asing kemari. Modal, ketrampilan dan kemampuan kepengusahaan dari luar itu kita perlukan untuk mempercepat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adalah wajar apabila kita memberi rangsangan yang menarik agar mereka mau menanam modal disini. Dan adalah wajar pula apabila mereka juga memperoleh keuntungan yang pantas.

Namun sejak semula kita waspada dan memberi syarat serta arah agar ekonomi nasional kita tidak tertelan oleh gelombang besar masuknya modal asing itu. Jangka waktu usaha mereka ada batasnya, bidang yang boleh mereka garap juga ada pembatasannya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban untuk memperbesar pengindonesiaan, baik dalam modal maupun tenaga. Dan dorongan untuk menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui PT Danareksa seperti yang saya singgung di atas juga merupakan salah satu segi pengamanan ekonomi nasional.

Karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap modal asing yang ingin menyertai kita dalam mempercepat jalannya pembangunan yang telah kita gariskan bersama itu.

Semuanya itu tidak perlu membuat kita rendah diri! Dan sekali-kali jangan kita meracuni diri sendiri dengan menghembus-hembuskan kehinaan bahwa kita telah menjual diri kepada pihak asing atau kita telah menggadaikan Tanah Air tercinta ini.

Jaman ini adalah jaman dimana bangsa-bangsa main merasa perlu saling bantu membantu dan kerjasama. Yang penting adalah bahwa kita tidak akan mengikatkan diri kepada negara-negara yang mengulurkan tangan bantuan tadi, baik secara politik maupun secara ekonomi dan kebudayaan. Dan memang, kita tidak selamanya bersamaan pandangan mengenai masalah-masalah politik dan masalah-masalah dunia lainnya dengan negara-negara pemberi bantuan itu. Dalam percaturan dunia mengenai Tata Ekonomi Dunia Baru misalnya, kita kadang-kadang lurus bertolak belakang pandangan dengan

negara-negara industri maju, yang umumnya memberi bantuan kepada kita.

Kita bertekad merdeka di lapangan politik! Kita juga bertekad mampu berdiri dengan kekuatan sendiri di lapangan ekonomi. Sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, kita ingin berkedaulatan di lapangan politik dan lapangan ekonomi.

Jalan ke arah itulah yang kita tempuh selama ini.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik sudah barang tentu juga memungkinkan pengembangan dalam bidang-bidang sosial-budaya. Pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan makin kita perbanyak, sehingga makin banyak murid dapat ditampung; sedangkan mutunya makin kita tingkatkan. Demikian pula pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin memperoleh perhatian dan pengarahan dari Pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan-perguruan tinggi.

Saudara Pimpinan Dewan yang terhormat;

Untuk menjamin kokohnya Bangsa dan peningkatan pembangunan di masa datang, maka pembinaan generasi muda — termasuk di dalamnya, mahasiswa —, mendapatkan perhatian yang besar. Berbagai sarana pendidikan di lingkungan sekolah rendah sampai perguruan tinggi dan di luar sekolah terus ditingkatkan sepadan dengan kemampuan keuangan negara. Sarana-Sarana di bidang olah raga, kesenian dan kebudayaan juga makin banyak, sebagian langsung dibangun oleh Pemerintah dan sebagian lagi oleh masyarakat sendiri. Dengan makin bertambahnya sarana-sarana itu maka dinamika dan kreativitas kaum muda bukannya dibendung, melainkan disalurkan kearah yang baik. Disamping sarana-sarana fisik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah kesempatan yang dibuka bagi kaum muda untuk berpikir dan bertindak kreatif. Kita semua gembira, melihat banyaknya dialog antara generasi muda dan generasi yang lebih tua. Pemerintah juga selalu membuka diri untuk berdialog dengan berbagai golongan masyarakat, termasuk dengan generasi muda. Dialog semacam ini sangat baik, sepanjang ada kesamaan landasan berpijak serta

ada kemauan baik untuk saling mendengar dan menerima pandangan yang memang obyektif dan benar. Dialog-dialog itu sebaliknya akan tidak mencapai sasaran, apabila tidak dilandasi dengan iktikad baik untuk memperluas pandangan dan mencapai kesimpulan-kesimpulan yang obyektif dan membangun, tetapi sebaliknya dilandasi oleh sikap apriori, apalagi apriori menentang Pemerintah: Terhadap kelompok-kelompok yang demikian ini yang hanya meliputi kelompok-kelompok yang kecil. saja Pemerintah bukan saja memandang tidak perlu melayani berdialog, tetapi bahkan perlu mengambil sikap yang tegas.

Masalah pembinaan generasi muda ini menjadi bertambah penting, sebab dalam tahun-tahun dekat yang akan datang Indonesia akan mengalami pergantian generasi. Pergantian generasi selamanya rawan. Tetapi kita percaya bahwa rasa tanggung jawab,, baik generasi yang tua maupun generasi yang lebih muda, akan dapat menemukan jalan yang tepat agar pergantian generasi ini dapat kita lampau dengan selamat; malahan menambah kekuatan baru agar dapat memberi arah yang makin tepat bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua yang terhormat;

Pelayanan kesehatan masyarakat makin kita perbaiki, antara lain dengan mendekatkan pusat-pusat kesehatan masyarakat ke tengah-tengah masyarakat.

Transmigrasi kita lanjutkan dan kits sempurnakan. Memang, jumlahnya masih jauh daripada kebutuhan, namun persiapan-persiapannya lebih matang. Transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat-tempat yang memerlukan tenaga kerja. Transmigrasi harus dapat memberikan hidup baru yang lebih baik dari tempat asal semula.

Pelaksanaan program keluarga berencana mencapai hasil-hasil yang membesarkan hati. Indonesia dianggap salah satu negara yang berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk di antara deretan panjang negara-negara sedang membangun lainnya. Namun program

keluarga berencana masih perlu diperluas dan digalakkan serta dipadukan dengan masalah kependudukan yang menyangkut segi-segi yang sangat luas.

Sementara itu kehidupan keagamaan bertambah mekar dan kerukunan hidup antara umat beragama yang berbeda-beda makin kuat. Musabaqah Tilawatil Qur'an yang baru-baru ini diselenggarakan di kota Manado, Ibukota Propinsi yang bagian terbesar penduduknya justru beragama Kristen, merupakan bukti yang menyejukkan hati bagaimana kerukunan hidup antara umat beragama yang berbeda-beda kita buktikan bersama-sama dalam masyarakat Pancasila ini, Kaum muda makin banyak berduyun-duyun mengunjungi tempat-tempat peribadatan agama masing-masing. Kebudayaan dan kesenian makin mekar sehingga membuat hidup ini terasa lebih bersemarak dan indah.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja buruh juga terus diusahakan. Persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya kini terus dilakukan dan diharapkan mulai 1 Januari 1978 nanti akan berlaku Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih; atau perusahaan yang mempunyai jumlah upah paling sedikit Rp. 5 juta sebulan akan mengikuti program Asuransi Sosial Tenaga Kerja ini. Buruh yang mendapat kecelakaan waktu bekerja akan mendapat jaminan keuangan tertentu. Demikian pula mereka yang telah mencapai usia pensiun, mereka yang menderita cacat total dan janda yang ditinggal mati suaminya. Dana untuk asuransi ini dihimpun bersama oleh perusahaan dan buruh.

Di masa-masa yang akan datang, akan dilaksanakan program asuransi sosial lainnya secara bertahap, sesuai dengan perkembangan keadaan.

Pembangunan bidang perumahan juga tetap mendapat perhatian dan diusahakan agar terus dapat ditingkatkan.

Di samping usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan beberapa puluh ribu rumah sederhana dan beberapa puluh ribu lagi tanah matang untuk perumahan sederhana seperti yang direncanakan dalam REPELITA II, maka Pemerintah terus berusaha untuk menggairah-

kan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk dapat membangun rumah sederhana. Juga tidak dilupakan langkah-langkah Pemerintah untuk meningkatkan peremajaan desa. Selain itu di kota-kota besar juga diadakan perbaikan kampung, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk mencegah kemerosotan lingkungan hidup di daerah-daerah perkotaan.

Pembangunan rumah-rumah sederhana yang ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan perbaikan kampung di kota serta peremajaan desa-desa menunjukkan bahwa pembangunan ini sangat memperhatikan nasib rakyat kebanyakan. Memang, pembangunan di bidang ini belum dapat dilaksanakan secara besar-besaran; namun langkah-langkah permulaan ke arah itu telah mulai kita jalankan.

Sungguh, Saudara Ketua, masih panjang jalan yang harus kita tempuh dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita rampungkan dalam usaha besar kita untuk meletakkan landasan yang sehat bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam perangkat demokrasi ekonomi yang harus kita tegakkan. Salah satu tugas penting adalah menyuburkan kehidupan koperasi

Dalam hubungan ini dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian kita pusatkan pada pembinaan BUUD/KUD sebagai unit koperasi yang terkecil tetapi sangat penting fungsi dan tugasnya, tanpa mengabaikan masalah-masalah pembinaan koperasi yang lain.

Yang kita inginkan adalah agar koperasi tetap hidup, baik dalam masa suram maupun dalam masa gemilang. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar kita, maka koperasi harus kita tumbuhkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kekeluargaan yang harus kita bangun, ialah demokrasi ekonomi. Ia harus dibina, dibantu dan dilindungi. Ia harus ditumbuhkan secara berhati-hati dan dilatih agar makin kuat memikul tugas yang lebih besar. Karena itulah BUUD/KUD yang telah kita bentuk pertama-tama ditugasi untuk ikut meningkatkan produksi pangan. Lambat faun, BUUD/KUD ini akan makin melebarkan sayapnya sehingga mampu menangani bidang-bidang lain yang lebih luas.

Demikianlah, saya telah mengajak kita semua untuk melihat secara umum apa yang kita kerjakan dan apa yang kita capai dalam melaksanakan pembangunan selama ini.

Sidang Dewan yang terhormat;

Keadaan keamanan dan ketertiban pada umumnya tetap berada dalam kendali alat-alat keamanan dan penegak hukum. Timbulnya gangguan keamanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Irian Jaya segera dapat diatasi oleh alat-alat negara, sehingga tidak sampai mengoyahkan stabilitas keamanan. Meskipun demikian kita harus tetap waspada, karena kita masih belum terbebas dari bahaya-bahaya laten yang ada dalam masyarakat, baik bahaya laten yang bersumber dari sisa-sisa G-30-S/PKI maupun dari unsur-unsur golongan ekstrim lainnya.

Sejalan dengan bertambah baiknya situasi keamanan, maka penyelesaian tahanan-tahanan G-30-S/PKI yang sekarang ini masih ada akan terus kita Laksanakan dan kita percepat. Tahanan Golongan "A" akan kita selesaikan paling lambat dalam tahun 1978.

Sedangkan bagi tahanan golongan "B" pada tahun 1977 ini akan kita kembalikan ke dalam masyarakat sebanyak 10.000 orang, sisanya akan dikembalikan sebanyak 10.000 orang dalam tahun 1978 dan sisanya lagi dalam tahun 1979. Dengan gelombang pembebasan tahanan yang demikian itu kita akan dapat membebaskan diri dari salah satu beban nasional yang selama ini kita pikul dengan sebaik-baiknya.

Dalam pada itu Propinsi Timor Timur telah berusia 1 tahun 1 bulan sejak wilayah itu bergabung dengan saudara-saudara sekandungnya di wilayah Republik Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat itu, suasana keamanan makin baik dan pembangunan di sana telah makin dirasakan oleh rakyat. Mereka dengan cepat merasakan suasana persaudaraan dengan penduduk di wilayah lainnya. Pemuda-pemudi mereka mengikuti Jambore Nasional di Sibolangit, olahragawan-olahragawan mereka mendapatkan sambutan hangat dalam PON ke-IX baru-baru ini. Tenaga-tenaga sipil mendapat latihan dan pendidikan.

Bekas tentara Tropaz dan polisi Portugal asal pribumi telah diberi pendidikan militer dan pendidikan polisi. Mereka telah ditugasi dalam bidang teritorial.

Bertepatan dengan suasana peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan kita yang bersejarah ini, saya ingin mengumumkan pemberian amnesti umum kepada sisa-sisa gerombolan bersenjata Fretilin di Timor Timur yang menyerahkan diri secara sadar kepada ABRI selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1977.

Dengan lapang dada Negara memberi anugerah pengampunan kepada mereka yang sadar kembali karena mereka dahulu secara tidak sadar telah disesatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Saya mengharapkan agar uluran tangan Pemerintah ini tidak sia-sia. Tidak ada gunanya mereka berada di gunung-gunung, karena rakyat Timor Timur menginginkan segera adanya pembangunan dan ketenteraman.

Sangat erat hubungannya dengan menegakkan ketertiban dan keamanan adalah langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah baru-baru ini untuk memberantas apa yang disebut "pungutan liar". "Pungutan liar" yang sebenarnya merupakan gejala yang salah dan tidak dapat dibenarkan, tetapi seolah-olah telah merupakan perbuatan yang biasa itu, apabila dibiarkan berlangsung berlarut-larut, bukan saja dapat merendahkan martabat dan kewibawaan aparaturnya Pemerintah, tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan. Langkah yang penting ini hanya akan berhasil apabila ada pengertian, kemauan baik dan kerjasama dari berbagai pihak masyarakat, disamping adanya langkah-langkah nyata di lingkungan aparaturnya sendiri untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di antara anggota-anggotanya. Dalam hubungan ini saya minta agar semua pejabat Pemerintah, sipil maupun ABRI, di semua tingkatan turut berusaha meniadakan "pungutan liar" ini. Para pimpinan dari setiap instansi dan lingkungan tugas agar mengintensifkan pengawasan di bidangnya masing-masing. Apabila terdapat petunjuk atau laporan adanya "pungutan liar" di lingkungannya agar segera diadakan penelitian dan diambil tindakan terhadap mereka yang terlibat.

Langkah-langkah penertiban ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi usaha pembinaan aparatur Pemerintah agar menjadi sehat dan efektif, yang dapat memperlancar dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah keseluruhannya,

Kepada masyarakat saya serukan untuk membantu usaha Pemerintah ini dengan turut menciptakan suasana serba tertib dan tidak mencoba memberikan “godaan” materiil kepada para petugas aparatur, apapun motif dan alasannya. Sebaliknya hendaknya masyarakat mau dan berani menolak permintaan dari siapapun (pejabat-petugas) untuk memberi atau membayar pungutan-pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya.

Sidang Dewan yang terhormat;

Apabila ke dalam kita mencapai banyak kemajuan, maka di gelanggang dunia kita juga ikut berperan. Dengan keteguhan dalam menjalankan politik luar negeri yang babas aktif, maka kita menggunakan setiap kesempatan untuk terus melangkah maju dalam usaha menciptakan perdamaian dunia dan keadilan antar bangsa-bangsa, khususnya perdamaian dan kestabilan regional Asia Tenggara.

Seperti telah pernah saya singgung dalam kesempatan lain, usaha yang keras telah kita curahkan untuk mendorong terciptanya landasan bagi terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru. Melalui Konperensi UNCTAD ke IV di Nairobi yang lalu, kita memainkan peranan penting dalam memupuk kesetiakawanan antara negara-negara yang sedang membangun dalam perjoangan untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang lebih adil.

Titik berat persoalannya berkisar pada masalah pembentukan program komoditi terpadu dan masalah beban hutang negara-negara yang sedang membangun. Yang kita perjoangkan adalah stabilitas harga pada tingkat yang layak dari komoditi ekspor negara-negara yang sedang membangun. Masalah ini menjadi penting, sebab harga yang layak tadi akan menjadi sumber perbaikan tingkat hidup jutaan petani perkebunan; disamping itu juga memperbaiki neraca pembayaran. Ini menunjukkan bahwa perbaikan nasib petani kita tarik ke tingkat perjoangan besar di gelanggang internasional. Demikian pula

kita memainkan peranan, yang aktif dalam Konperensi Paris, yang terkenal sebagai "Dialog Utara — Selatan". Perjuangan ini masih akan berjalan panjang dan berat.

Namun perjuangan itu akan lebih berhasil dengan kuatnya persatuan dan kesetiakawanan antara negara-negara yang sedang membangun yang tergabung dalam kelompok Dunia Ketiga. Berbagai kesempatan telah kita gunakan untuk membina persatuan dan kesetiakawanan itu seperti melalui Kelompok 77, kelompok Non Blok, OPEC dan Konperensi Islam.

Dalam rangka OPEC Indonesia bersama dengan sepuluh negara OPEC lainnya menunda kenaikan harga minyak bumi yang sedianya harus naik lagi dengan 5% pada 1 Juli 1977, Langkah ini penting untuk menggalang keutuhan dan persatuan dalam OPEC, lebih-lebih karena OPEC merupakan ujung tombak yang ampuh bagi perjuangan Dunia Ketiga dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi dunia.

Suatu hasil yang menggembirakan dalam perjuangan kita di forum internasional adalah kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam perjuangan pengakuan internasional atas Wawasan Nusantara. Dalam hal ini dalam tahun ini kita telah mencapai kemajuan yang menggembirakan. Wawasan Nusantara telah dimantapkan dalam konsepsi negara kepulauan seperti yang tercantum dalam rancangan pasal-pasal yang akan menjadi dasar perbincangan dalam Sidang Konperensi Hukum Laut PBB yang akan menetapkan konvensi hukum laut yang baru.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi hukum laut baru, yang semula telah mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara sahabat tetangga kita dan dari negara-negara yang sedang berkembang lainnya, dalam Sidang Konperensi Hukum Laut PBB yang lalu telah memperoleh dukungan yang makin luas, yaitu dukungan dari beberapa negara maritim besar dan negara-negara maju lainnya.

Perjuangan Wawasan Nusantara yang dapat dikatakan sudah berada di ambang pintu keberhasilan itu sungguh penting artinya bagi pemeliharaan integritas wilayah dan kokohnya ketahanan nasional

kita. Demikian pula sangat besar artinya bagi pengamanan wilayah luas Indonesia sebagai wadah besar kekayaan alam dan pencadangan-nya bagi pembangunan nasional demi kepentingan generasi-generasi yang akan datang.

Organisasi regional kita, ASEAN, juga telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Sejak lahirnya perhimpunan ini di Bangkok dahulu, maka kini ASEAN telah menjadi kenyataan yang mempunyai hak hidup dan menunjukkan kemampuannya untuk berkembang.

Sejalan dengan geloranya pembangunan di kelima negara anggotanya, maka ASEAN sejak semula memusatkan perhatiannya kepada kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan rakyatnya masing-masing.

Sejak terselenggaranya KTT ASEAN I di Bali bulan Pebruari 1976, maka ASEAN mulai bergerak untuk benar-benar memberi isi kepada organisasinya dengan kerjasama diberbagai — terutama di bidang ekonomi — secara nyata. Berbagai kesepakatan kerjasama telah dihasilkan sebagai pelaksanaan dari keputusan-keputusan Bali itu; seperti perdagangan atas dasar preferensi, pendirian industri ASEAN di masing-masing negara, kerjasama di bidang pangan dan pertanian, enersi, telekomunikasi dan perhubungan, keuangan dan lain-lain. Demikian pula kerjasama di bidang sosial, budaya dan penerangan telah dicapai berbagai keputusan kerjasama.

KTT ASEAN di Kuala Lumpur setelah mengadakan penilaian kembali hasil-hasil ASEAN selama ini, khususnya setelah KTT Bali, telah sepakat untuk meneruskan dan meningkatkan kerjasama diberbagai (bidang itu dan sepakat pula untuk meningkatkan mekanisme organisasi ASEAN agar dapat memperlancar pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN, sehingga dengan demikian adanya organisasi ASEAN itu dapat diarahkan faedahnya secara langsung oleh negara-negara anggota dan rakyatnya masing-masing.

Adalah juga merupakan peristiwa yang bersejarah bagi perkembangan ASEAN, bahwa setelah selesainya KTT di Kuala Lumpur itu Kepala-kepala Pemerintahan ASEAN di satu pihak telah mengadakan

dialog dengan negara-negara sahabat di luar ASEAN, yaitu Australia, Jepang dan Selandia Baru.

Maksud dialog-dialog itu tidak lain adalah untuk menggalang saling pengertian dan kerjasama yang lebih mantap dan saling menguntungkan antara ASEAN di satu pihak dan negara-negara yang bersangkutan di pihak lain. Hasilnya sungguh menggembirakan. Berbagai kesepakatan telah tercapai dengan masing-masing negara Australia, Jepang dan Selandia Baru untuk melaksanakan kerjasama yang lebih nyata dan saling menguntungkan, yang akan dapat memperlancar pelaksanaan program-program dan proyek-proyek ASEAN.

Sidang Dewan yang terhormat;

Demikianlah gambaran yang menyeluruh mengenai apa yang kita kerjakan dan kita capai sampai saat ini. Hasil-hasil yang kita capai itu jelas belum memuaskan kita semua. Karena harapan-harapan dan apa yang ingin kita capai jauh lebih banyak dari yang mungkin kita capai. Mungkin juga kita telah membuat kesalahan-kesalahan atau menghadapi kegagalan-kegagalan. Kesalahan dan kegagalan itu harus kita ukur secara wajar. Membesar-besarkan kesalahan dan kegagalan di luar kewajaran, dapat membuat kita putus asa dan patch semangat. Bangsa yang membangun tidak mengenal putus asa. Bangsa yang membangun tidak akan patah semangat.

Kita memang tidak perlu putus asa dan patah semangat. Sebab, dengan tidak mengabaikan masih adanya kesalahan dan kegagalan tadi, kita jelas telah- mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih besar.

Marilah kita berusaha untuk meniadakan atau memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan agar dapat dihasilkan prestasi yang semakin besar pula.

Dahulu kita berjoang bahu membahu dalam menegakkan Kemerdekaan Nasional. Dan karena itu kita menang. Sekarang dan seterusnya kita harus bahu membahu makin erat, agar kita juga menang dalam perjoangan mengusir keterbelakangan, kemiskinan dan kepincangan-kepincangan.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat;

Sebelum saya mengakhiri Pidato Kenegaraan ini, ijin kan saya, Saudara Ketua, untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati ini.

Sekarang ini mungkin kesempatan terakhir saya berbicara dari mimbar ini di hadapan Saudara-saudara semua para Anggota Dewan yang terhormat.

Pada tanggal 1 Oktober nanti, Insya Allah, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru —hasil Pemilu 1977 — akan dilantik. Saya dan seluruh Menteri Kabinet saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang selama ini Saudara-saudara berikan kepada Pemerintah. Kami juga berterima kasih atas kritik-kritik halus dan serangan-serangan tajam yang telah Saudara-saudara tujukan ke berbagai kebijaksanaan Pemerintah. Saudara-saudara telah menggunakan hak-hak demokrasi Dewan yang terhormat ini sesuai dengan ketinggian martabat wakil-wakil rakyat yang berdaulat. Jauh lebih penting dari kepuasan rokhani kita masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, maka apa yang telah, Saudara-saudara tunjukkan jelas merupakan rintisan jalan ke arah tumbuhnya demokrasi yang makin sehat dan pelaksanaan konstitusi yang lebih kuat di masa-masa datang.

Sebagian dari Saudara-saudara mungkin tetap duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat baru nanti. Sebagian lainnya meninggalkan Dewan ini untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara di bidang lain.

Karena itu saya tidak ingin menyampaikan ucapan "selamat berpisah" kepada Saudara-saudara semua. Kita lebih tepat saling mengucapkan "Sampai Bertemu" lagi. Sebab di manapun kita berada, kita selamanya mempunyai panggilan tugas yang sama, ialah mengabdikan kepada Rakyat, Bangsa dan Negara kita yang terus membangun ini.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
